

ABSTRAK

Tulisan ini merupakan analisis fenomena ekonomi-politik dalam pembangunan kota pintar di negara berkembang menggunakan studi kasus megaproyek IKN, Indonesia. Melalui pendekatan *spatial fix*, tulisan ini memosisikan pembangunan kota pintar sebagai strategi pemerintahan Jokowi dalam merespons krisis urban Jakarta sekaligus menjadi sarana legitimasi politiknya. Sementara itu, dengan menggunakan pendekatan neokolonialisme, tulisan ini menganalisis implikasi dari pembangunan kota pintar yang direpresentasikan melalui relasi kuasa global dan ketimpangan struktural. Temuan utama menunjukkan bahwa pembangunan kota pintar yang dibingkai dengan narasi modernisasi pada dasarnya hanya merupakan kepentingan kelompok elite yang menghasilkan eksklusi sosial terhadap kelompok marginal, terutama masyarakat adat di Kalimantan Timur. Secara keseluruhan, tulisan ini dapat menjadi kontribusi teoritis dalam studi hubungan internasional, khususnya pada diskursus pembangunan global, serta memberikan refleksi kritis terhadap kebijakan kota pintar di IKN, Indonesia.

Kata kunci: kota pintar, *spatial fix*, neokolonialisme, IKN, pemerintahan Jokowi.

ABSTRACT

This study is a political-economy analysis of smart city in Global South, using the IKN megaproject in Indonesia as a case study. Through the spatial fix approach, this study positions smart city as the Jokowi administration's strategy to respond to Jakarta's urban crisis while simultaneously as a tool for political legitimization. Meanwhile, by employing a neocolonialism approach, the paper analyzes the implications of smart city development as represented through global power relations and structural inequality. The main findings reveal that smart city, framed by a modernization narrative, essentially serves elite interests and results in the social exclusion of marginalized groups, particularly Indigenous communities in East Kalimantan. Overall, this research offers a theoretical contribution to international relations studies, especially within the discourse of global development, while providing a critical reflection on smart city policies in IKN, Indonesia.

Keywords: *smart city, spatial fix, neocolonialism, IKN, Jokowi administration.*